



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 1965**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN  
ALAT KESEHATAN "KASA HUSADA", INDUSTRI KULIT,  
INDUSTRI PEMINTALAN, INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN,  
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN INDUSTRI KERAMIK, INDUSTRI  
LOGAM DAN MESIN, INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI KAYU BAHAN  
BANGUNAN DAN SABUT, INDUSTRI KARET, INDUSTRI NABATI DAN  
INDUSTRI ES DAN PELEBURANNYA KEDALAM BEBERAPA  
PERUSAHAAN DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat perlu diatur lebih lanjut soal pembubaran beberapa Perusahaan Negara yang didirikan dengan Peraturan-peraturan No. 82 dan No. 181 s/d 191 tahun 1961 untuk kemudian dilebur ke dalam beberapa Perusahaan Daerah;
- b. bahwa perlu pula ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan pembubaran dan peleburan tersebut dalam huruf a;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10);

4. Penetapan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) jo Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 117);
5. Peraturan Pemerintah No. 82, 191 s/d 191 tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964;
7. Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/Tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya ke dalam beberapa perusahaan daerah.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es, masing-masing didirikan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 82, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 dan 191 tahun 1961 dibubarkan dan dilebur ke dalam Perusahaan-perusahaan Daerah.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

- (1) Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditetapkan olehnya melaksanakan pembubaran dan peleburan Perusahaan-perusahaan Negara dan menyelesaikan hak dan kewajiban dari Perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 1.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas termaksud pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengkonsultasi Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III apabila hal itu mengenai Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 3.

Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas termaksud pada pasal 2 di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III/Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 1965.

Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 27



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**PEMBUBARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN**  
**ALAT KESEHATAN "KASA HUSADA", INDUSTRI KULIT,**  
**INDUSTRI PEMINTALAN, INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN,**  
**INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI KERAMIK, INDUSTRI**  
**LOGAM DAN MESIN, INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI KAYU BAHAN**  
**BANGUNAN DAN SABUT' INDUSTRI KARET. INDUSTRI NABATI DAN**  
**INDUSTRI ES DAN PELEBURANNYA KEDALAM BEBERAPA**  
**PERUSAHAAN DAERAH.**

UMUM

1. Dalam rangka mengisi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah menurut Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 perlu diadakan langkah-langkah untuk dengan segera memberikan kepada Daerah sumber-sumber penghasilan yang dapat membiayai segala pengeluaran serta kesempatan menjalankan kegiatan-ekonomi dan pembangunan sesuai dengan prinsip "berdiri diatas kaki sendiri" dalam rangka swadaya Daerah.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 24 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 tentang keharusan adanya dekonsentrasi dalam soal management, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat dan agar memperhatikan keadaan dimasing-masing Daerah beberapa Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 82 dan No. 181 sampai dengan No. 191 tahun 1961, perlu dibubarkan serta dilebur kedalam beberapa Perusahaan Daerah.

PASAL...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan politik yang diuraikan dalam Penjelasan Umum maka Pemerintah menyerahkan beberapa Perusahaan Negara tersebut dalam pasal ini kepada Daerah Tingkat I

### Pasal 2

- (1) Penyerahan termaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dengan bantuan suatu Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dibentuk khusus untuk itu. Dalam masa likwidasi maka Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditunjuk olehnya menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Perusahaan-perusahaan Negara termaksud, disamping mengatur, mengkoordinir serta mengawasi Perusahaan-perusahaan yang ada di Daerah.
- (2) Berhubungan dengan kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia melalui Presidium Kabinet, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengkonsultasi Presidium, Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III mengenai Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Ibukota Jakarta Raya.

### Pasal 3 dan pasal 4

Ketentuan-ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964.

### Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2743